

IMPLEMENTASI PROGRAM FASILITASI PARTISIPASI MASYARAKAT DI KELURAHAN API-API KECAMATAN BONTANG UTARA KOTA BONTANG

Ardi Sukma Wahana¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan program fasilitasi partisipasi masyarakat dan mendeskripsikan Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang yang diharapkan mampu meningkatkan fasilitas penyelenggara pelayanan administrasi, sarana dan prasarana di lingkungan RT, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori implementasi, partisipasi, dan pembangunan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan 3 (tiga) informan sebagai sumber memperoleh data, dengan menggunakan teknik sampling purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif Model Interaktif Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara berupa dana 50 juta rupiah per-RT disambut baik oleh masyarakat di Kota Bontang karena mampu mengakomodir keinginan masyarakat sekitar. Pembangunan yang dilaksanakan dirasakan langsung oleh warga sekitar di lingkungan RT karena pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan warga, sesuai dengan apa yang sudah dimusyawarahkan dan kesepakatan bersama.

Kata Kunci : implementasi program fasilitasi partisipasi masyarakat

Pendahuluan

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Bontang telah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan pembangunan di Kota Taman. Beberapa sektor menjadi perhatian termasuk program dana bantuan 50 juta rupiah per-RT.

Sesuai dengan janji Wali Kota, H. Adi Dharma, dalam sebuah sumber berita (Samarinda *PosOnline*, diunduh 08/12), program pemberian bantuan dana 50 juta rupiah untuk pelaksanaan program pembangunan di tingkat RT tahun ini dapat dilaksanakan. Tepat dipertengahan Agustus hampir seluruh RT telah melengkapi persyaratan untuk mencairkan dana tersebut. Bahkan cukup banyak

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ardisukmawahana@yahoo.com

RT yang telah melaksanakan pembangunan dengan menggunakan anggaran Rp 50 juta rupiah untuk pembangunan tingkat RT.

Program dana bantuan 50 juta rupiah per-RT dilakukan untuk mengakomodir pembangunan di setiap wilayah RT di Kota Bontang. Hal ini didasari bahwa kebutuhan pembangunan berbeda-beda disetiap wilayah RT. Dengan adanya kebijakan program dana bantuan 50 juta rupiah per-RT mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan disetiap masing-masing wilayah RT.

Penyaluran program 50 juta rupiah kepada 489 Rukun Tetangga (RT) disetiap 15 kelurahan yang terdapat di Bontang sudah diatur dalam Perwali Nomor 39 tahun 2011 tentang pelaksanaan program fasilitas partisipasi masyarakat untuk dapat meningkatkan pembangunan dan mengembangkan potensi yang ada disetiap lingkungannya.

Dalam meningkatkan pembangunan di tingkat rukun tetangga (RT) program bantuan dana 50 juta rupiah per-RT dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain: a) Masih terdapat kesenjangan dan belum meratanya pembangunan di tingkat rukun tetangga (RT) khususnya ketersediaan sarana dan prasarana umum, serta kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat. b) Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan yang dibangun pemerintah maupun dukungan swadaya masyarakat serta masih perlunya membangun masyarakat yang berbudi luhur. c) Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ditingkat rukun tetangga (RT) maka pemerintah Kota Bontang menyelenggarakan program fasilitas partisipasi masyarakat berupa bantuan dana 50 juta rupiah per-RT untuk peningkatan peran serta masyarakat.

Pelaksanaan program dana 50 juta rupiah per-RT telah melalui pengkajian yang sistematis, karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Atas dasar pembangunan itulah Pemerintah Kota Bontang menjadikan sebagai program unggulan dan merupakan satu-satunya di Indonesia, dimana setiap RT di subsidi dana dalam jumlah yang cukup untuk dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam membangun berbagai sarana dan prasarana.

Dalam meningkatkan pembangunan di Kelurahan Api-Api di setiap 39 RT harus memahami kebutuhan dan masalah-masalah mendesak yang dihadapi oleh setiap RT, sehingga usaha-usaha pembangunan yang berlangsung benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing RT. Kebijakan ProLita diharapkan merupakan salah satu langkah pelaksanaan dari usaha untuk pemeratakan pembangunan di setiap RT. Dengan demikian kebijakan ini dapat merangsang partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara luas dalam proses pembangunan di setiap RT. Maka potensi dan aspirasi yang terdapat didalam masyarakat dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah secara cermat.

Di kelurahan Api-Api kecamatan Bontang Utara kota Bontang terdapat 39 RT yang menerima program 50 juta rupiah per-RT. Dana 50 juta rupiah tidak seluruhnya diberikan kesetiap RT. Proses rencana penggunaan dana tersebut dilakukan melalui musyawarah warga untuk mendapatkan kesepakatan bersama,

yang selanjutnya diajukan rincian data program kegiatan pembangunan ke kelurahan.

Program fasilitasi 50 juta rupiah per-RT ternyata masih menyisakan persoalan yaitu dengan adanya keterlambatan dan kekurangan RT dalam penyerahan berkas pengajuan administrasi pencairan pengadaan barang sehingga menyebabkan lambatnya pelaksanaan pembangunan di lingkungan RT. Selain dari lambatnya penyerahan berkas administrasi, juga disebabkan karena masih rendahnya sumber daya manusia dalam memahami dan mengelola program 50 juta rupiah per-RT, sehingga dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan yang mengakibatkan pro dan kontra di masyarakat. Selain itu, kurangnya aktifnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program fasilitasi partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan program 50 juta rupiah per-RT masih terdapat kecemburuan sosial dari proses pembangunan yang disebabkan tidak meratanya pembangunan di beberapa wilayah RT, seperti pembangunan di bidang infrastruktur, ekonomi dan sosial yang tidak menyeluruh sehingga pembangunan tidak seluruhnya dirasakan oleh masyarakat sekitar yang diakibatkan oleh terbatasnya dana pembangunan. Dengan demikian apakah program bantuan tersebut tetap harus dilakukan atau dihentikan.

Ketidak-merataan pembangunan di setiap RT di bidang infrastruktur meliputi pembuatan jembatan, semenisasi, dan pelebaran jalan di setiap gang untuk memudahkan akses warga, selain itu permasalahan yang timbul adalah tidak adanya selokan sehingga air pembuangan rumah tangga mengalir ke lahan kosong sehingga menimbulkan bau tidak sedap, dan pelebaran selokan agar di saat hujan air tidak sampai meluap kejalan dan ke rumah warga. Poskamling dapat juga diusulkan di setiap lingkungan RT sehingga warga dapat secara bergantian aktif meningkatkan keamanan.

Dalam pelaksanaannya, ketua RT dan perangkatnya menjadi bagian terpenting dalam menentukan usulan pembangunan dalam menggunakan dana tersebut. Tugas ketua RT bukan hanya sekedar memberikan sosialisasi kepada masyarakatnya, tetapi dapat melakukan perencanaan dan kegiatan melalui musyawarah kepada semua warga di wilayahnya masing-masing. Dana bantuan 50 juta rupiah per-RT masih mengutamakan pembangunan di bidang infrastruktur

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul :”Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang”.

Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara? Serta faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Implementasi Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Api-Api?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara di harapkan mampu meningkatkan fasilitas penyelenggaraan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana di lingkungan rukun tetangga (RT) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Serta mampu mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program fasilitas partisipasi masyarakat di Kelurahan Api-Api.

Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sosial, terutama dalam pengembangan ilmu kebijakan publik. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak - pihak yang berkepentingan khususnya para aparat pelaksana dalam memberikan kejelasan tentang pelaksanaan pembangunan. Sebagai informasi dan sumbangan pemikiran guna penelitian ilmiah lainnya dan dapat dikembangkan lebih lanjut yang mengarah pada keberhasilan pelaksanaan program dan bantuan.

Kerangka Dasar Teori

Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap final. Suatu kebijakan selalu berhubungan dengan implementasi atau dengan kata lain proses pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada baik dan buruknya suatu kebijakan dan juga gagal atau berhasilnya implementasi suatu kebijakan

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksana dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar

Faktor-Faktor Yang Menghambat Dan Mendukung Implementasi Kebijakan

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu:

- a. Komunikasi (*Communication*)
- b. Sumber Daya (*Resources*)
- c. Disposisi
- d. Struktur Birokrasi

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan peran seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan atau pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan

Partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

- a. Partisipasi Langsung
- b. Partisipasi Tidak Langsung

Sasaran dan Pengelolaan Penggunaan Dana Implementasi

Sasaran dan pengelolaan penggunaan dana implementasi adalah:

1. Sasaran pelaksanaan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat adalah semua RT di Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang yaitu sebanyak 39 RT.
2. Pedoman pelaksanaan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota.
3. SKPD Kelurahan selaku pelaksanaan Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik dan keuangan atas pelaksanaan kegiatan serta wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Walikota Bontang.
4. Penggunaan dana Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat diarahkan untuk pelaksanaan 3 bidang pembanguana, yaitu meliputi:
 - a. bidang infrastruktur
 - b. Bidang ekonomi
 - c. Bidang sosial

Definisi Konseptual

Sebagai program bantuan dari pemerintah kota Bontang berupa pencapaian sasaran dan pengelolaan penggunaan dana program fasilitas masyarakat berupa 50 juta rupiah per-RT yang diharapkan memacu usaha pertumbuhan dan perubahan dalam melaksanakan pembangunan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang meliputi;

1. Studi Implementasi Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat
2. Penganggaran dan penggunaan dana program fasilitas partisipasi masyarakat di Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.
3. Pembinaan dan Pengawasan dana bantuan program fasilitas partisipasi masyarakat di Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau melukiskan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

Fokus Penelitian

Sesuai dengan isi pedoman Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 39 Tahun 2011, agar memudahkan dalam pelaksanaan penelitian perlu ditetapkan suatu fokus penelitian yaitu:

1. Studi Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat
 - a. Pelaksana program Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara
 - b. Ketersediaan sumber daya
 - c. Komunikasi antara RT dengan masyarakat dan RT dengan SKPD
 - d. Partisipasi masyarakat dan kelompok sasaran program
2. Penganggaran dan penggunaan dana Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.
3. Pembinaan dan pengawasan dana bantuan program fasilitasi partisipasi masyarakat di Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.

Sumber dan Jenis Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:107) yang dimaksud dengan sumber data adalah benda, hal atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya tentang data.

Ada pun jenis data dalam penelitian ini adalah sumber data yang terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder. Untuk itu data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang terdiri atas :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui informan dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada Ketua RT dan masyarakat sekitar secara langsung dan dipadu melalui pedoman wawancara sesuai dengan indikator-indikator yang akan penulis akan teliti. Penulis dapat memperoleh data dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu sehingga terlihat relevan dengan desai peneliti, dalam artian orang yang dapat memberikan data secara optimal melalui wakil-wakil dari sumber data. Dan penulis memilih :

 - a. Lurah di Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.
 - b. Ketua-ketua RT di Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang
 - c. Masyarakat disekitar RT di Kelurahan Api-Api
2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah pengambilan data melalui tangan kedua atau dengan perantara orang lain, seperti dokumen, catatan, maupun perpustakaan. Data ini dikumpulkan untuk meengkapi data primer.

Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
Pengumpulan data dilakukan dengan menggali dan mempelajari sumber atau bahan yang diperlukan sebagai landasan penelitian berupa teori-teori dan konsep-konsep yang keabsahannya sudah terjamin, data tersebut dapat diperoleh melalui buku-buku, majalah, koran, laporan penelitian dan data-data sekunder lainnya yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*)
Cara pengumpulan data, informasi, bahan-bahan secara langsung kelapangan di lokasi penelitian, yaitu dengan cara :
 1. Observasi
 2. Wawancara
 3. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif, yang dikemukakan oleh Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman (2007:20) bahwa analisis kualitatif terdiri dari 4 (empat) komponen :

- a. Pengumpulan Data
Mengumpulkan seluruh data pertama dan data mentah, yang dikumpulkan dalam suatu kegiatan penelitian.
- b. Reduksi Data
Adalah merupakan pemilihan, pemusatan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi dan data kasar yang terkumpul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, pilihan-pilihan penelitian tentang data yang dikode, mana yang dibuang, mana yang meringkas sejumlah bagian yang terbesar, cerita-cerita apa yang sedang berkembang.
- c. Penyajian Data
Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.
- d. Verifikasi Data/Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan adalah setelah mengemukakan arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang memungkinkan alur sebab. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Maka yang muncul dari data juga harus diuji kebenarannya dan kecocokannya, yaitu merupakan validitasnya.

Penyajian Data dan Pembahasan

Luas dan batas wilayah, Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara memiliki luas wilayah 125 hektar yang masing-masing wilayahnya dibagi menjadi

42 RT. Kelurahan Api-Api merupakan salah satu dari 15 (lima belas) kelurahan yang ada diwilayah Kota Bontang. Penduduk yang ada di Kelurahan Api-Api tergolong heterogen. Dari data-data keadaan penduduk daerah asal menunjukkan suatu pola kehidupan pembaruan atau asimilasi dengan penduduk setempat. Jumlah penduduk seluruhnya 15.981 jiwa.

Melalui Peraturan Walikota Bontang Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat, alokasi anggaran yang diberikan setiap RT oleh Pemerintah Kota Bontang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pertahun yang diperlukan dan diprioritaskan untuk meningkatkan pembangunan di lingkungan RT yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan oleh ketua RT.

Bantuan 50 juta per-RT adalah Program Unggulan Pemerintah Bontang, yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Bontang Tahun 2011-2016, dalam rangka efektivitas pelaksanaan pembangunan ditingkat RT diimplementasikan dengan kegiatan berupa Peningkatan Peran Serta Masyarakat RT dalam bentuk Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat. Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dilatarbelakangi atas beberapa hal yang antara lain :

1. Masih terdapat kesenjangan dan belum meratanya pembangunan di tingkat rukun tetangga (RT) khususnya ketersediaan sarana dan prasarana umum, serta kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat
2. Masih rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaan saran dan prasarana
3. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ditingkat rukun tetangga (RT)

Dana bantuan program Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pertahun dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong menyelesaikan permasalahan yang ada ditingkat rukun tetangga (RT) dan meningkatkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat di lingkungan RT.

Pelaksana Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat sesuai dengan Peraturan Walikota No.39 Tahun 2011 tentang struktur dan tugas-tugas pelaksana implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat. Berikut ini beberapa pelaksana implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat:

a. Pelaksana Rukun Tetangga (RT)

Pelaksana di tingkat RT ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah atas usulan dari pengurus Rukun Tetangga yang terdiri dari pelaksana ditingkat RT antara lain:

1. Ketua : Ketua RT
2. Sekretaris : Sekretaris RT
3. Anggota : Tokoh Masyarakat (2 orang)

Tugas Pelaksana tingkat rukun tetangga (RT) yaitu melakukan sosialisasi kegiatan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat di wilayahnya. Beberapa kegiatan yang di sosialisasikan meliputi kegiatan pembangunan yang berasal dari Prolita (program lima tahun)

dengan jumlah 50 juta rupiah yang digunakan untuk meningkatkan fasilitas penyelenggaraan pelayanan administrasi RT, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana lingkungan RT, meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

b. Pelaksana Tingkat Kelurahan

Lurah sebagai Pengguna Anggaran (PA) di kelurahan mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Selain itu juga dibentuk Tim Tingkat Kelurahan yang ditetapkan berdasarkan keputusan lurah yang terdiri dari:

1. Ketua : Lurah
2. Sekretaris : Sekretaris Lurah
3. Anggota :
 - a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
 - c. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - d. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
 - e. Pengurus Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
 - f. Pengurus Kelompok Kerja Kelurahan Sehat
 - g. Staf Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Tugas tim pelaksana ditingkat kelurahan antara lain melakukan sosialisasi Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat untuk kegiatan peningkatan peran masyarakat RT dan seluruh ketua RT di wilayahnya

Kelurahan memberikan pendampingan kepada RT di wilayahnya dalam Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat. Dalam pelaksanaan program, pihak kelurahan menyediakan data informasi dan dokumen Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat. Kelurahan di harapkan mampu mendorong peran aktif masyarakat dalam kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat.

Dalam pelaksanaan program, kelurahan melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) untuk membahas masukan dan usulan-usulan yang berasal dari masing-masing RT. Kelurahan melakukan verifikasi usulan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat sebagai bahan Lurah dalam menyusun Renja dan RKA SKPD Kelurahan. Kelurahan menghimpun pengajuan permohonan kegiatan dan pencairan dana dari usulan RT.

Lebih lanjut lagi, kelurahan diharuskan mampu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dan membantu permasalahan yang timbul dikelompok masyarakat secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan program, pihak kelurahan melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan Program kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat setiap triwulan kepada Walikota melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat dengan tembusan disampaikan kepada camat. Hasil pertanggung jawaban pelaksanaan program, kelurahan membuat laporan akhir Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat kepada walikota dan

Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dengan tembusan disampaikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

c. Tim Pendamping Kecamatan

Tim pendamping Kecamatan ditetapkan berdasarkan keputusan camat yang terdiri dari pelaksana ditingkat kecamatan antara lain:

1. Ketua : Camat
2. Sekretaris : Sekretaris Camat
3. Anggota : a. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
b. Kasi Ekonomi dan Pembangunan
c. Pengurus PKK
d. Pengurus Forum Komunikasi Kelurahan Sehat

Tugas Tim Pendamping Kecamatan adalah mengkoordinasikan Pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat oleh kelurahan di wilayahnya. Kecamatan melaksanakan pendampingan kepada kelurahan dalam pengelolaan dana Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat. Dalam pelaksanaan program kecamatan juga melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat oleh kelurahan di wilayahnya, Membantu dan memberikan saran dan masukan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Lebih lanjut lagi, kecamatan diwajibkan melaporkan perkembangan pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat secara rutin setiap triwulan kepada walikota dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM).

d. Tim Fasilitas Kota

Di tingkat kota dibentuk Tim Fasilitas Kota, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Bontang dengan susunan sebagai berikut:

1. Walikota : Penasehat
2. Wakil Walikota : Penasehat
3. Sekretaris Daerah : Pengarah I
4. Asisten I (Asisten Administrasi Daerah) : Pengarah II
5. Kepala BAPPEDA : Ketua
6. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat : Wakil Ketua
7. Kabid EKOSOSBUD : Sekretaris
8. Kabid Pendataan (BAPPEDA) : Anggota
9. Kabid Fispra (BAPPEDA) : Anggota
10. Kepala Inspektorat : Anggota
11. Kepala Dinas PU : Anggota
12. Kabag Pemerintahan : Anggota
13. Kasi Partisipasi Masyarakat : Anggota
14. Ketua FORKOHAT : Anggota

Tugas dari Tim Fasilitas Tingkat Kota adalah melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan program fasilitasi partisipasi masyarakat dan melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program fasilitasi partisipasi

masyarakat. Dalam pelaksanaan program, Tim Fasilitas Tingkat Kota memberikan bimbingan teknis yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pertanggung jawaban kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat kepada SKPD di Kota Bontang.

Penganggaran dan penggunaan dana Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dilaksanakan oleh semua RT melalui Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang berupa dana bantuan pembangunan senilai 50 juta rupiah. Dana pembangunan dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk pembangunan yaitu pembangunan dibidang infrastruktur 60%, bidang sosial 20%, dan pembangunan dibidang ekonomi 20%.

Bantuan operasional pembangunan yang berasal dari Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan fasilitas penyelenggaraan pelayanan administrasi RT, meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana lingkungan RT, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dan mampu meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Penganggaran dana Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat diarahkan untuk pelaksanaan tiga bidang pembangunan yaitu meliputi bidang infratraktur, bidang ekonomi dan bidang sosial dengan prioritas utama pada bidang infrastruktur. Secara rinci penggunaan dana dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang infrastruktur

1. Pengerasan jalan skala kecil
2. Semenisasi jalan gang atau lorong
3. Pembuatan dan atau perbaikan selokan atau *drainase* lingkungan (parit)
4. Perbaikan sarana lingkungan (gang)
5. Pembuatan posyandu yang pembiayaannya dapat dilaksanakan secara terpadu di lingkungan RT, apabila jumlah balita di satu RT belum mencukupi jumlah minimum 50 balita dalam satu wilayah RT
6. Pengadaan peralatan posyandu (meja, kursi)
7. Pembuatan poskamling lingkungan
8. Pembuatan taman lingkungan RT
9. Pembuatan bak sampah
10. Pembuatan dan atau pemeliharaan MCK umum
11. Pembuatan jaringan air bersih skala kecil
12. Pembuatan sarana dan prasarana olah raga skala kecil
13. Pembuatan penerangan jalan gang (skala kecil)
14. Pembuatan sumur biopori
15. Pembuatan sumur resapan air dalam skala kecil

b. Bidang ekonomi

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha ekonomi kerakyatan
2. Pelatihan berbagai jenis keterampilan usaha dalam skala kecil

3. Pengadaan bibit tanaman sayuran dan palawija, bibit ternak dan benih ikan dalam skala kecil
- c. Bidang sosial
1. Pemberian santunan natura (bantuan makanan) kepada penduduk miskin lanjut usia dalam skala kecil
 2. Kegiatan seni dan budaya lokal dalam skala kecil;
 3. Kegiatan bulan bakti gotong-royong masyarakat ditingkat RT
 4. Kegiatan keagamaan ditingkat RT
 5. Kegiatan pertemuan-pertemuan di tingkat RT

Pelaksanaan dana program melalui pengajuan perencanaan penggunaan dana sesuai dengan rebug warga yang dilaksanakan oleh ketua RT. Ketua RT dilarang mengajukan dana program tanpa persetujuan warga.

Teknis pemberian dana program 50 juta rupiah tidak dapat diberikan dalam bentuk *cash* tetapi diberikan dalam bentuk material sesuai dengan program yang diajukan oleh ketua RT melalui rebug warga. Hal ini agar dana yang berikan tidak disalah gunakan oleh pihak RT dan menciptakan transparansi dilingkungan RT sehingga dana yang digunakan dapat diketahui oleh semua warga sekitar. Dana Implemtasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat idak semuanya diberikan dalam bentuk 50 juta rupiah tetapi adanya potongan-potongan administrasi dan potongan pajak dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan adanya pemotongan administrasi dan potongan pajak dirasa tidak akan memaksimalkan pembangunan di lingkungan RT.

Pembangunan lebih banyak digunakan dalam bidang infrastruktur dan dibidang sosial. Sedangkan pembangunan dibidang ekonomi untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha ekonomi kerakyatan dan pelatihan berbagai jenis keterampilan kurang tersentuh Implementasi Program Faslilitasi Partisipasi Masyarakat.

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Program 50 juta Rupiah per-RT yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitas Kota Bontang dan Tim Pendamping Kecamatan sebagai pembina dan yang mengawasi pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan Peraturan Walikota Bontang No.39 Tahun 2011 pembinaan dan pengawasan oleh Tim Fasilitas Kota meliputi:

- a. Penyediaan buku pedoman pelaksanaan kegiatan Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat
- b. Melaksanakan sosialisasi pedoman pelaksanaan kegiatan Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat
- c. Melakukan Bimbingan teknis penyelenggaraan keuangan kelurahan yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban
- d. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Sedangkan pembinaan Tim Pendamping Kecamatan dalam Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat meliputi:

- a. Pendampingan penyelenggaraan penyusunan perencanaan, administrasi pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di kelurahan
- b. Pendampingan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat
- c. Hal-hal lain yang terkait dengan kegiatan Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang dalam Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat, yaitu:

- a. Tim Pelaksana Kota melakukan rapat pengendali secara berkala seluruh kelurahan per triwulan terhadap kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat
- b. Tim Pendamping Kecamatan melakukan pengendalian pelaksana kegiatan di seluruh kelurahan di wilayah kerjanya
- c. Pengawasan melekat dilakukan oleh atasan langsung Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) fasilitasi partisipasi masyarakat

Penutup

Kesimpulan

Dalam hal ini penulis menarik kesimpulan dan saran-saran khususnya mengenai Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.

1. Pelaksanaan Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat di Kota Bontang berupa dana bantuan 50 juta rupiah per-RT disambut baik oleh masyarakat di Kota Bontang, khususnya masyarakat di lingkungan Kelurahan Api-Api, karena mampu mengakomodir keinginan masyarakat sekitar.
2. Komunikasi pihak RT dengan masyarakat dan pihak Kelurahan Api-Api komunikasi dilakukan melalui musyawarah antara Ketua RT dengan masyarakat sekitar dalam melaksanakan program apa saja yang akan dilaksanakan. Ketua RT menampung semua keluhan dan pendapat dari setiap warganya. Pertimbangan-pertimbangan Ketua RT dalam melaksanakan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat mengutamakan kebutuhan yang mendesak dalam menganggarkan dana 50 juta rupiah. Pihak kelurahan hanya memberikan langkah-langkah penggunaan program dan mengawasi dana apa yang termasuk dan tidak termasuk dalam penganggaran dana Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat.
3. Pembangunan yang dilakukan pihak RT sudah cukup dirasakan oleh masyarakat di lingkungan RT masing-masing karena pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan warga, sesuai dengan apa yang sudah dimusyawarahkan dan kesepakatan bersama.
4. Tingkat partisipasi warga dalam Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat sangat rendah karena warga di lingkungan RT didominasi oleh pendatang yang menyewa di lingkungan RT, sehingga kurang peduli terhadap lingkungan sekitar.

5. Penggunaan dana Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat lebih memprioritaskan kegiatan pembangunan dibidang infrastruktur.
6. Pembangunan yang dilaksanakan tidak melibatkan langsung partisipasi warga disekitar lingkungan RT. Pembangunan dilaksanakan oleh CV yang ditunjuk oleh Ketua RT untuk mengerjakan pembangunan infratraktur. Jika pihak RT tidak memiliki CV di lingkungan RT-nya, pihak Kelurahan yang mencarikan CV yang mampu melaksanakan pembangunan dibidang infrastruktur.
7. Pembinaan yang dilakukan oleh pihak kelurahan cukup baik sedangkan pengawasan yang dilakukan pihak kelurahan dalam pelaksaan pembangunan kurang, karena masih adanya keluhan dari pihak RT tentang pelaksaan pembangunan infrastruktur yang kurang baik oleh pihak CV yang ditunjuk pihak Kelurahan.

Saran

1. Perlunya dilakukan sosialisasi dari pihak RT untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mengenai Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat agar memahami bahwa penggunaan dana 50 juta Rupiah yang diberikan oleh pemerintah untuk kebaikan bersama bukan individu seseorang atau kelompok suatu masyarakat.
2. Dalam proses pemberian dana diharapkan dana 50 juta Rupiah tidak ada potongan-potongan berupa administrasi dan potongan pajak, sehingga dana bantuan yang diberikan dapat digunakan dengan maksimal untuk meningkatkan pembangunan dilingkungan RT di Kelurahan Api-Api
3. Dalam hal pelaksanaan pembangunan, kontribusi partisipasi masyarakat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang infrastruktur agar masyarakat dapat merasa memiliki langsung infrastuktur di lingkungan wilayah masing-masing dan dapat merawat dengan baik. Tidak lagi dilaksanakan oleh CV sebagai pelaku pelaksana teknis pembangunan infrastruktur.
4. Dalam hal pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kelurahan sebagai pengawas langsung jalannya pembangunan di Lingkungan RT harus benar-benar menuntun jalannya pembangunan yang dilaksanakan oleh Ketua RT mulai dari tahap perencanaan, penggunaan dana, dan pelaksanaan proyek pembangunan supaya dana yang direalisasikan sesuai dan tepat sasaran sehingga tidak ada penyelewengan segala bentuk pembangunan yang diperuntukan untuk masyarakat bisa dirasakan manfaatnya.
5. Implementasi Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat diharapkan menjadi peraturan daerah sehingga program tersebut terus berjalan karena mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung.

Daftar Pustaka

Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: BumiAksara

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press
- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Jakarta: Fisip-UI Press
- Astuti, Irene. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM Press
- Dilla, Sumadi. 2007. *Komunikasi Pembangunan*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita
- Milles. B Matthew dan Huberman A. Michael, 2007. *Komponen-Komponen Analisis Data Kualitatif.*, Jakarta: Raja Grafitia
- Nurdin dan Usman. 2004. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PustakaPelajar
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rasyid, M. Ryaas, Syaukani.HR, Afan Gaffar. 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Putaka Pelajar
- Widodo. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media

Internet :

id.m.wikipedia.org/wiki/kota_bontang, diakses tanggal 22 Agustus 2012

Dokumen-dokumen :

Peraturan Walikota Bontang Nomor 39 Tahun 2011, *Pedoman Pelaksanaan Program Fasilitasi Partisipasi Masyarakat*.